

Distribusi Belanja dan Capaian Status Pembangunan Desa di Provinsi Riau

Bakti Kharisma*, Werry Darta Taifur, Fajri Muharja

Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Correspondence email: baktikharisma@gmail.com

Abstract. *The Village Law has become one of the breakthroughs in overcoming the impact of development that tends to be urban bias. Village is no longer only an object of development but the main actor in rural development process. The source of the budget for the implementation of rural development has increased significantly with the village fund policy. This study aims to analyze the impact of village budgets and village typology on the achievement of village status in Riau Province. Multiple linear regression model was used to analyze the impact of village budget and village typology has a significant impact on the increase in the developing village index in Riau Province.*

Keywords : *budget impact; geographic difficulty index; Riau province; village fund.*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi tonggak perubahan dalam paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan bidang pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang tata kelolanya berpedoman pada 13 azas yaitu rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan *sustainable*. Hal ini sesuai dengan prinsip *money follows function* dan *money follows*, program desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2009; Kemenkeu, 2017; dan UU No. 20/2018). Melalui Undang-Undang Desa ini, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat oleh kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan yang dapat dialokasikan untuk belanja daerah. Dalam Pasal 72 ayat (1), dijelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; 2) Dana Desa yang bersumber dari APBN; 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%); 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum); 5) Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD masing-masing Kabupaten/Kota; 6) Hibah dan sumbangan yang berasal dari pihak ketiga; dan 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah (UU No. 6 Tahun 2014).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah perdesaan, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antar Desa, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu, 2017). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b UU No. 6/2014 adalah bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 ayat (2) bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan : jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kementerian Desa dan PDT Trans, 2016). Meskipun masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis Desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Saat ini, seharusnya dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal (Kemenkeu, 2017).

Pendapatan terbesar yang diterima oleh desa di Provinsi Riau pada tahun 2018 secara rata-rata bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota minimal sebesar 10 Persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana Desa adalah dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dengan mekanisme penyaluran melalui APBD Kabupaten/Kota

yang penggunaannya bertujuan untuk belanja bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2018 merupakan tahun ke empat dilaksanakannya kebijakan Dana Desa. Selama empat tahun alokasi anggaran Dana Desa telah meningkat dari semula Rp 20 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 60 triliun di tahun 2018. Rata-rata Dana Desa yang diterima oleh desa di Provinsi Riau pada tahun 2018 berjumlah Rp 848,776,382.00 sedangkan rata-rata Alokasi Dana Desa berjumlah Rp 848,776,382.00.00. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa diminta melakukan pengelolaan anggaran dengan bijak, sesuai dengan prioritas kebutuhan dengan sasaran meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan kemandirian desa.

Indeks Desa Membangun merupakan salah satu alat ukur tingkat pembangunan desa (Yulitasari & Tyas, 2020). Indeks Desa Membangun didesain memperkuat upaya mencapai tujuan pembangunan desa dan bermanfaat dalam menganalisis status perkembangan masing-masing desa yang berkaitan erat dengan karakteristik serta dikembangkan sebagai instrument pencapaian target rencana pembangunan pemerintah (Hanibal, 2015). Indeks Desa Membangun membagi desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Penentuan status diperoleh atas dasar hasil pengukuran tiga kelompok variabel yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Status desa Provinsi Riau berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2019 terdiri dari 45 desa sangat tertinggal, 422 desa tertinggal, 961 desa berkembang, 163 desa maju, dan 10 desa mandiri. Keberhasilan pembangunan wilayah tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur. Indeks Kesulitan Geografis memiliki nilai skor 0 sampai dengan 100 dimana skor yang mendekati angka 100 maka tingkat kesulitan geografisnya semakin tinggi. Sebaliknya, desa dengan skor yang mendekati angka 0 maka tingkat kesulitan geografisnya semakin rendah dengan lebih tersedianya pelayanan dasar, infrastuktur yang baik dan tersedianya sarana transportasi.

Penelitian tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, kondisi geografis dan rumah tangga dengan status desa telah banyak dilakukan. (Oktaviana & Bachruddin, 2017) menghasilkan kesimpulan Indeks Desa Membangun di Provinsi Banten yang rendah perlu ditingkatkan dengan upaya pemerintah provinsi dalam menaikkan dimensi variabel indeks ketahanan ekonomi dan Ekologis. (Muhtarom *et al.*, 2018) menghasilkan kesimpulan untuk meningkatkan ketahanan sosial desa Gadingrejo perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan masyarakat. (Lalira *et al.*, 2018) menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian dengan hasil berbeda dilakukan oleh (Sunu & Utama, 2019) yang menyimpulkan Dana Desa tidak berdampak positif pada tingkat kemiskinan tetapi positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Alokasi Belanja Desa yang terdiri dari belanja pemerintahan desa, belanja bidang pembangunan desa, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja pembinaan kemasyarakatan dan belanja tidak terduga telah disalurkan kepada desa di Provinsi Riau pada tahun 2018 berkisar Rp 1.6 milyar. Besarnya alokasi belanja tersebut ternyata belum mampu meningkatkan capaian meningkatkan kemandirian desa. Capaian Indeks Desa Membangun tahun 2019 masih menyisakan 45 desa sangat tertinggal dan 422 desa berstatus tertinggal dan hanya sebanyak 10 desa dengan status Desa Mandiri.

Metode

Desain atau jenis penelitian ini adalah kajian yang bersifat *quantitative-exploratory approach* untuk memperoleh hasil empiris atas kajian atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek pengamatan (Sharma, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan *exploratory research*, dengan desain metode penelitian yang akan menggambarkan dan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai situasi dan kejadian yang sebenarnya (Sekaran dan Bougi, 2010). Analisis deskriptif juga digunakan dalam menganalisis perkembangan alokasi belanja dan tipologi desa (karakteristik wilayah) serta probabilitas capaian Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju di Provinsi Riau untuk alokasi tahun anggaran 2018 dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan, pendekatan metode kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen penelitian secara *statistical test* dengan menggunakan pendekatan model regresi linier berganda (*multiple linear regression*)

Objek kajian penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sekaran, dan Bougi, 2010). Objek kajian penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 1591 desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota (10 kabupaten dan 2 kota) dalam kerangka alokasi tahun anggaran 2018 dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, seiring dengan hasil observasi secara langsung dalam pengumpulan dan ketersediaan data APBDes kabupaten/kota baik Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) masing-masing desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Riau, maka populasi penelitian hanya berkisar pada 10 kabupaten saja yang lebih representatif dijadikan objek dalam penelitian ini. Dari 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau, 2 kota tidak dapat dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena 2 kota tersebut (Kota Pekanbaru dan Kota Dumai) tidak memiliki wilayah administratif desa.

Rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya dianalisis dengan pendekatan spesifikasi model penelitian yaitu model ekonometrik *multiple regression* dan model *probability deterministic* (Hair, *et al.*, 2014). Metode dasar yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan menspesifikasikan melalui pendekatan

model sederhana ekonomi makro daerah (*small regional macroeconomics model*) (Kementerian Keuangan RI, 2005 dan Rickman, 2010). Model yang dikembangkan bersifat model perekonomian tertutup, karena tidak adanya aliran barang/jasa, modal, dan tenaga kerja baik dengan perekonomian luar negeri maupun antar daerah (*Cobb-Douglas Function*). Dalam Model ini, fungsi produksi *Cobb-Douglas* diasumsikan sebagai fungsi output atau capaian Indeks Desa Membangun (IDM) masing-masing desa di kabupaten, Provinsi Riau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2018 yang ditentukan oleh hubungannya dengan sejumlah input (alokasi anggaran Dana Desa dan tipologi desa). Fungsi produksi *Cobb-Douglas* mempunyai asumsi bahwa jumlah parameter sama dengan satu, yaitu jika $\alpha + \beta = 1$, maka $\beta = 1 - \alpha$, sehingga fungsi produksi ini merupakan fungsi produksi homogen berderajat satu atau *homogen linier*. Artinya, jika input diperbesar menjadi n kali input semula, maka output juga menjadi n kali output semula atau $n f(K,L) = nQ$. Jika fungsi *Cobb-Douglas* (Q) dituliskan dalam bentuk model ekonometrik *multiple regression* dengan melibatkan lebih dari 2 faktor input atau variabel ($X_1, X_2, \dots, X_n$), maka secara matematis hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut (Pyndick & Rubenfield, 2009) :

$$Q_t = \beta_0 K^{\beta_1} L^{\beta_2} e^{\varepsilon_t}$$

$$Q_t = \beta_0 X_1 \beta^1, X_2 \beta^2, \dots, X_i \beta^i, \dots, X_n \beta^n, e^{\varepsilon} \text{ Atau,}$$

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n)$$

Dimana, Y : variabel *outcome*; X : variable prediktor; β_0 : *intercept* atau konstanta; $\beta_1, \dots, \beta_n$: koefisien regresi; ε : kesalahan (*disturbance term*); dan e : logaritma natural. Jika pada persamaan (3.2) dan (3.3) di atas, untuk kedua sisi dikalikan dengan logaritma natural ($\ln$) atau *double log* pada periode waktu dan lokasi tertentu (it), maka model ekonometrik *multiple regression* dengan melibatkan lebih dari 2 faktor input atau variabel ($X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$) dari fungsi *Cobb-Douglas* dimana, $Y_{it} = \ln Q_{it}$; $\alpha_0 = \ln \beta_0$; $X_{1it} = \ln K_{it}$; $X_{2it} = \ln L_{it}$; dan seterusnya menjadi (Pyndick & Rubenfield, 2009):

$$\ln Q_{it} = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln K_{it} + \beta_2 \ln L_{it} + \varepsilon_{it} \quad Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_i X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Sehingga diperoleh model ekonometrik *multiple regression* pada Model penelitian ini pada periode waktu dan lokasi tertentu (it) adalah sebagai berikut :

$$IDM_{it} = \beta_0 + \beta_1 BPD_{it} + \beta_2 BBD_{it} + \beta_3 BPM_{it} + \beta_4 BPK_{it} + \beta_5 BTT_{it} + \beta_6 JRT_{it} + \beta_7 IKG_{it} + \beta_8 BTS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana, IDM_{it} : Variabel *outcome* atau capaian Indeks Desa Membangun ke- it ; BPD_{it} : Variabel prediktor Belanja Bidang Pemerintahan Desa ke- it ; BBD_{it} : Variabel prediktor Belanja Bidang Pembangunan Desa ke- it ; BPM_{it} : Variabel prediktor Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat ke- it ; BPK_{it} : Variabel prediktor Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ke- it ; BTT_{it} : Variabel prediktor Belanja Tidak Terduga ke- it ; JRT_{it} : Variabel prediktor Jumlah Rumah Tangga ke- it ; IKG_{it} : Variabel prediktor Indeks Kesulitan Geografis ke- it ; BTS_{it} : Variabel prediktor Keberadaan Menara Telekomunikasi ke- it ; α_0 : *Intercept* atau Konstanta; $\beta_1, \dots, \beta_n$: Parameter yang Diduga (Koefisien Regresi); ε_{it} : Faktor Pengganggu (*Disturbance Term*)

Estimasi model ekonometrik *multiple regression* pada Model penelitian di atas memerlukan prasyarat *best linear unbiased estimator* dan terbebas dari uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi) pada *level of significancy* $\alpha = 5\%$. Indikator estimasi penting lainnya adalah nilai Koefisien Determinasi (R^2) yang menunjukkan kemampuan atau kontribusi variabel preditor dalam menentukan variabel *outcome* model dalam bentuk koefisien korelasi *multiple regression* yang dipengaruhi oleh faktor pengganggu (variabel lain) di luar model. Tahapan estimasi selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan sebelumnya (hipotesis awal). Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu : 1) Uji hipotesis secara simultan dengan menggunakan nilai *F-test* model estimasi atau nilai *p-value of significance* (p . *Sig*) pada *level of significancy* $\alpha = 5\%$, dimana H_0 diterima jika p .*Sig* > α dan H_a diterima jika p .*Sig* < α dan 2) Uji hipotesis secara parsial dengan nilai *t-test* model estimasi atau nilai *p-value of significance* (p .*Sig*) masing-masing variabel prediktor (alokasi anggaran Dana Desa dan tipologi desa) pada *level of significancy* $\alpha = 5\%$, dimana H_0 diterima jika p .*Sig* > α dan H_a diterima jika p .*Sig* < α (Pyndick & Rubenfield, 2009 dan Hair, et al., 2014). Hipotesis dalam penelitian ini adalah

Adapun hipotesis sebagai jawaban sementara atas penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja bidang pemerintahan desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau.

H₂ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja bidang pembangunan desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau.

H₃ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja bidang pemberdayaan masyarakat terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau.

H₄ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja bidang pembinaan kemasyarakatan terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau.

H₅ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja tidak terduga terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau.

H₆ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara tipologi desa (karakteristik wilayah) terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Riau.

Hasil

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara umum berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan data publikasi Kementerian Desa PDT dan Trans tahun 2018 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019 yang merujuk pada alokasi anggaran belanja Desa dan Indeks Desa Membangun di Provinsi Riau sebanyak 873 sampel Desa. Penelitian ini melibatkan 8 (delapan) variabel independen terkait alokasi anggaran belanja Desa (belanja bidang pemerintahan Desa, belanja bidang pembangunan Desa, belanja bidang pemberdayaan masyarakat, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga), tipologi Desa (karakteristik wilayah) (Indeks Kesulitan Geografis), jumlah rumah tangga, dan keberadaan menara telekomunikasi, dan Indeks Desa Membangun (IDM) serta probabilitas masing-masing Desa menjadi Desa tertinggal, berkembang, dan maju sebagai variabel dependen.

Sebelum melakukan pembahasan terhadap hasil pengujian secara statistik melalui analisis regresi linier berganda serta pengujian atas hipotesis dalam model penelitian ini, akan disajikan terlebih dahulu mengenai statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengetahui tentang karakteristik sampel penelitian yang digunakan. Distribusi pengukuran deskripsi ini terkait dengan jumlah sampel, nilai rata-rata sampel dan tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel penelitian, serta nilai maksimum dan minimum dari masing-masing variabel penelitian.

Berdasarkan deskripsi Tabel 1, bahwa beberapa distribusi ukuran statistik deskriptif dari setiap variabel dalam penelitian ini. Dari keseluruhan observasi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 873 Desa berdasarkan sampel Desa pada data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada 7 kabupaten di Provinsi Riau. Indeks Desa Membangun yang dicapai Desa pada masing-masing kabupaten di Provinsi Riau dalam penelitian ini secara rata-rata adalah sebesar 0,6322 atau dapat saja dikategorikan masuk kedalam status Desa berkembang ($> 0,599$ dan $\leq 0,707$), dengan nilai terendah sebesar 0,4059 dan tertinggi sebesar 0,9049. Hal ini dilihat dari nilai capaian Indeks Desa Membangun masing-masing Desa, dari 873 Desa sebagai sampel penelitian lebih dominan masuk kedalam kategori status Desa berkembang dengan rata-rata sebesar 0,6117 ($> 0,599$ dan $\leq 0,707$), dengan nilai dummy 1;0 dan cukup bervariasi antara satu Desa dengan Desa lainnya sebesar 0,4876; variasi Desa tertinggal sebesar 0,4414, dan variasi Desa maju sebesar 0,3281 dengan nilai dummy 1 dan 0. Komposisi alokasi anggaran belanja Desa pada masing-masing kabupaten di Provinsi Riau dari 873 Desa sebagai sampel untuk belanja bidang pemerintahan Desa secara rata-rata adalah sebesar Rp. 628,23 juta, tertinggi adalah sebesar Rp. 2.179,13 juta dan masih ada beberapa Desa yang belum dianggarkan serta paling bervariasi diantara alokasi anggaran belanja bidang lainnya sebesar 3,3705. Untuk alokasi belanja pembangunan Desa secara rata-rata adalah sebesar Rp. 838,12 juta, dimana merupakan alokasi anggaran belanja Desa paling besar diantara alokasi belanja Desa lainnya sebesar Rp. 2.885,53 juta. Untuk alokasi belanja pemberdayaan masyarakat secara rata-rata hanya sebesar Rp. 131,87 juta, tertinggi hanya sebesar Rp. 8.007 juta dan masih ada beberapa Desa yang belum dianggarkan dan tidak variatif. Untuk alokasi belanja pembinaan kemasyarakatan secara rata-rata hanya sebesar Rp. 128,31 juta, tertinggi hanya sebesar Rp. 1.023,99 juta dan masih ada beberapa Desa yang belum dianggarkan dan tidak variatif. Alokasi anggaran belanja Desa yang paling sedikit jumlahnya adalah belanja tidak terduga secara rata-rata hanya sebesar Rp. 158 juta, tertinggi hanya sebesar Rp. 529,1 juta dan masih ada beberapa Desa yang belum dianggarkan dan sangat tidak variatif.

Tabel 1.
Deskripsi Indeks Desa Membangun, Alokasi Anggaran Belanja Desa, dan Tipologi Desa di Provinsi Riau Tahun 2019

Variabel Penelitian	Sampel	Min	Max	Mean	Std. Dev
Capaian Indeks Desa Membangun :					
Indeks Desa Membangun (<i>indeks_desbang</i>)	873	0,4059	0,9049	0,6322	0,0708
Desa Tertinggal (<i>d_dtinggal</i>)	873	0	1	0,2646	0,4414
Desa Berkembang (<i>d_kembang</i>)	873	0	1	0,6117	0,4876
Desa Maju (<i>d_dmaju</i>)	873	0	1	0,1226	0,3281
Alokasi Anggaran Belanja Desa :					
Belanja Pemerintahan Desa (<i>b_pmrnthdes</i>)	873	0	21,7913	6,2823	3,3705
Belanja Pembangunan Desa (<i>b_bangundes</i>)	873	0	28,8553	8,3812	2,5801
Belanja Pemberdayaan Masyarakat (<i>b_dayamas</i>)	873	0	8,0070	1,3187	1,2977
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan (<i>b_binamas</i>)	873	0	10,2399	1,2831	1,2416
Belanja Tidak Terduga (<i>b_tdkterduga</i>)	873	0	0,5291	0,0158	0,0572
Tipologi Desa (Karakteristik Wilayah) :					
Indeks Kesulitan Geografis (<i>indeks_geo</i>)	873	15,03	81,38	42,74	11,38
Jumlah Rumah Tangga (<i>jmlh_rt</i>)	873	70	4557	626,55	539,30
Keberadaan Menara Telekomunikasi (<i>d_bts</i>)	873	0	1	0,55	0,50

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020.

Kemudian, untuk variabel tipologi Desa (karakteristik wilayah) masing-masing kabupaten di Provinsi Riau dari 873 Desa sebagai sampel, untuk Indeks Kesulitan Geografis secara rata-rata adalah sebesar 42,74 atau masih dapat dikategorikan cukup baik karena nilai indeksinya mendekati nol (di bawah 50%) dengan adanya ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi pada masing-masing Desa, dimana terendah adalah sebesar 15,03 meskipun masih ada Desa dengan angka Indeks Kesulitan Geografis yang paling tinggi sebesar 81,38 serta cukup variatif. Untuk jumlah rumah tangga masing-masing Desa secara rata-rata adalah sebanyak 626,55 rumah tangga, tertinggi adalah sebanyak 4.557 rumah tangga atau dapat dikategorikan Desa tersebut memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tentunya sangat potensial menjadi faktor pendorong bagi Desa untuk lebih maju serta jumlahnya sangat bervariasi. Sedangkan, untuk karakteristik keberadaan menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) pada masing-masing Desa di Provinsi Riau secara rata-rata adalah sebesar 0,55 atau mendekati 1 (satu) yang berarti sudah tersedia akses layanan telekomunikasi di 873 Desa yang menjadi sampel penelitian.

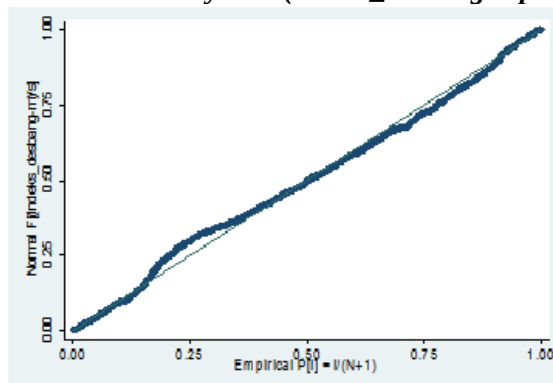
Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dianalisis dengan pendekatan model ekonometrik *linear multiple regression* dengan metode dasar model sederhana ekonomi makro daerah (*small regional macroeconomics model*) (Kementerian Keuangan RI, 2005). Model yang dikembangkan adalah estimasi dari *Cobb-Douglas Function* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi anggaran belanja Desa (belanja pemerintahan Desa, belanja pembangunan Desa, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga) dan tipologi Desa (Indeks Kesulitan Geografis, jumlah rumah tangga, dan *dummy* BTS) terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) masing-masing Desa di Provinsi Riau tahun 2019.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Gambar 1.
Normal Probability Plot (*indeks_desbang depvar*)



Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Gambar 1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola distribusi yang digunakan dalam pembentukan model empiris penelitian ini (distribusi *Normal P-Probability Plot*, Indeks Desa Membangun sebagai variabel dependen) menggambarkan sebaran data yang sebenarnya berada di sekitar garis diagonal dan membentuk sebuah garis lurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris penelitian berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya.

Multikolinearitas

Tabel 2.
Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) Model

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Belanja Pemerintahan Desa	0,279477	1,21	No Multikolinearity
Belanja Pembangunan Desa	0,828801	3,58	No Multikolinearity
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	0,355568	2,81	No Multikolinearity
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	0,714278	1,40	No Multikolinearity
Belanja Tidak Terduga	0,916987	1,09	No Multikolinearity
Indeks Kesulitan Geografis	0,783289	1,28	No Multikolinearity
Jumlah Rumah Tangga	0,699467	1,43	No Multikolinearity
Dummy BTS	0,875667	1,14	No Multikolinearity

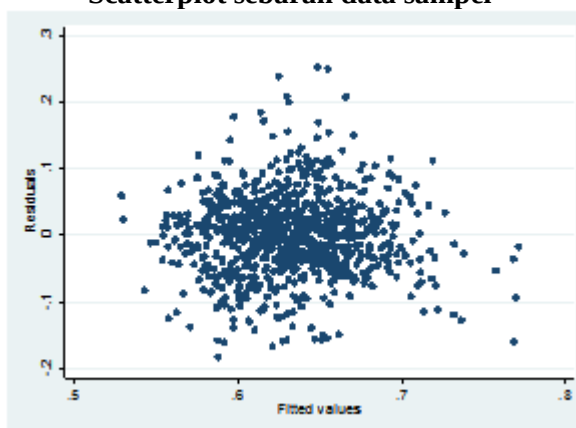
Sumber: Data Olahan

Tabel 2, bahwa nilai *VIF* dalam *Collinearity Statistics* model penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* seluruh variabel dalam model mendekati atau = 1 (satu) atau sama dengan nilai *VIF* > 1. Secara statistik seluruh *VIF* seluruh variabel dalam model penelitian ini berada di bawah atau < 5. Sehingga kedelapan variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas atau hubungan antar variabel independen sangat kecil.

Heterokedastisitas

Deteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dalam permodelan penelitian ini dilakukan dengan metode *Breusch-Pagan* dan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot* antara *fitted value* dengan *residual*. Berdasarkan hasil pengolahan data (2020), diperoleh nilai *Breusch-Pagan* atau *Cook-Weisberg test for heteroskedasticity* model empiris ini dimana $H_0 = \text{constant variance}$ dan *variables* : *fitted values of indeks_desbang* dengan nilai $\text{Chi-Square2}(1) = 0,36$ dan $\text{Prob.} > \text{Chi2} = 0,5485$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau disebut juga bersifat homoskedastisitas.

Gambar 2.
Scatterplot sebaran data sampel



Sumber: data olahan

Faktor Penentu Capaian Status Pembangunan Desa

Pengujian signifikansi model dilakukan untuk memeriksa apakah variabel independen memiliki pengaruh yang nyata dalam model penelitian ini pada *level of significancy*, $\alpha = 5\%$. *Overall fit test* yang digunakan dalam model regresi linier berganda pada penelitian ini berdasarkan hipotesis bahwa $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k$; tidak ada variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel terikat dan $H_a : \beta_j \neq 0; j = 1, 2, 3 \dots k$: ada; atau minimal harus terdapat satu

variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel terikat. Statistik yang digunakan dalam uji ini berdasarkan pada estimasi *Analysis of Varian (ANOVA) degree of freedom (n-k)*, dimana k merupakan parameter dalam model. Statistik uji ANOVA mengikuti sebaran F_{test} dengan derajat bebas k . H_0 ditolak, jika nilai $F_{test} > F_{tabel}$ atau nilai probabilitas dari F_{test} ($Prob. > F$) atau uji signifikansi antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang berarti pada model terdapat sekurang-kurangnya terdapat satu penduga parameter yang tidak sama dengan nol.

Tabel 3.
Estimasi Overall Fit Model, Indeks_Desbang (Depvar)

Indikator Output	Overall Fit Model
Number of Observations	873
$F(8, 864)$	40,45
Prob. > F	0,0000
Root MSE	0,06064
MS Model	0,14879
MS Residual	0,00368
MS Total	0,00501
Kesimpulan	H_a diterima : model layak digunakan

Sumber: data olahan

Berdasarkan indikator output *Overall Fit Model* pada Tabel 3, maka dapat dilihat bahwa $Prob. > F$ adalah sebesar 0,000. Dengan menggunakan *level of significancy*, $\alpha = 5\%$, diperoleh hasil uji bahwa $Prob. > F$ dimana $F(8, 864) = 40,45$ dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 873 Desa pada masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019 lebih kecil dibandingkan taraf nyata yang memberikan keputusan untuk tolak H_0 dan terima H_a . Begitu juga dengan nilai *Root Mean Square of Estimate (MSE)* model lebih kecil daripada *Mean Square Model* ($0,06064 < 0,14879$) atau dapat dikatakan model regresi baik untuk dijadikan model peramalan. Dengan demikian, model dengan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai variabel dependen dan prediktor bebas alokasi anggaran belanja Desa (belanja bidang pemerintahan Desa, belanja bidang pembangunan Desa, belanja bidang pemberdayaan masyarakat, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga) dan tipologi Desa (Indeks Kesulitan Geografis, jumlah rumah tangga, dan *dummy* keberadaan menara telekomunikasi atau BTS) adalah layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit Model*) digunakan untuk melihat kecocokan model yang digunakan atau seberapa besar kemampuan variabel independen sebagai prediktor dalam menjelaskan variabel dependen sebagai variabel hasil. Kriteria pengujian yaitu terima H_a jika koefisien determinasi model (*R-Squared*) atau *Adjusted R-Squared* semakin mendekati 1 (satu) pada *level of significancy*, $\alpha = 5\%$.

Tabel 1.
Estimasi Goodness Of Fit Model, Indeks_Desbang (Depvar)

Indikator Output	Goodness of Fit Model
Number of Observations	873
<i>R-Squared</i>	0,2725
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,2658
Prob. > F	0,0000
Kesimpulan	H_a diterima : model layak digunakan

Sumber: data olahan

Berdasarkan indikator output *Goodness of Fit Model* pada Tabel 4 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R-Squared* adalah sebesar 0,2658. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,2658 memberikan makna bahwa alokasi anggaran belanja Desa (belanja bidang pemerintahan Desa, belanja bidang pembangunan Desa, belanja bidang pemberdayaan masyarakat, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga) dan tipologi Desa (Indeks Kesulitan Geografis, jumlah rumah tangga, dan *dummy* keberadaan menara telekomunikasi atau BTS) dapat menentukan capaian Indeks Desa Membangun sebesar 26,58% sedangkan sisanya sebesar 73,42% ditentukan oleh faktor lainnya di luar model. Dengan demikian, meskipun kontribusi variabel prediktor terhadap variabel hasil dalam model I masih kategori rendah namun secara keseluruhan memberikan nilai $Prob. > F = 0,0000$ atau lebih kecil daripada *level of significancy*, $\alpha = 5\%$ dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 873 Desa pada masing-masing

kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019 lebih kecil dibandingkan taraf nyata yang memberikan keputusan untuk tolak H_0 dan terima H_a yang berarti bahwa model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Untuk membentuk model yang layak tersebut di atas kedalam persamaan regresi linier berganda (Indeks Desa Membangun atau *indeks_desbang* sebagai variabel dependen) sesuai dengan pendekatan model *Cobb-Douglas*, maka dapat disusun seperti pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5.
Estimasi Model Persamaan Empiris, Indeks_Desbang (Depvar)

<i>Indepvar</i>	<i>Coef.</i>	<i>Std. Err.</i>
Belanja Pemerintahan Desa (<i>b_pmrthdes</i>)	0,0006957	0,0011525
Belanja Pembangunan Desa (<i>b_bangundes</i>)	-0,0016582	0,0008742
Belanja Pemberdayaan Masyarakat (<i>b_dayamas</i>)	0,0078215	0,0026539
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan (<i>b_binakemas</i>)	0,0041891	0,0019571
Belanja Tidak Terduga (<i>b_tdkterduga</i>)	0,0080808	0,0375026
Jumlah Rumah Tangga (<i>jmlh_rt</i>)	0,0000181	0,0000455
Indeks Kesulitan Geografis (<i>indeks_geo</i>)	-0,0019675	0,0002039
Keberadaan Menara Telekomunikasi (<i>d_bts</i>)	0,0206538	0,0044108
Konstanta (<i>_cons</i>)	0,6872519	0,0121556

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat diestimasi model persamaan empiris atas hasil penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \dots + \beta_i X_{it} + \dots + \beta_n X_{nt} + \varepsilon_{it}$$

$$\begin{aligned} \text{indeks_desbang} &= 0,6872519 + 0,0006957 \text{ b_pmrthdes} - 0,0016582 \text{ b_bangundes} \\ &+ 0,0078215 \text{ b_dayamas} + 0,0041891 \text{ b_binakemas} + 0,0080808 \text{ b_tdkterduga} \\ &+ 0,0000181 \text{ jmlh_rt} - 0,0019675 \text{ indeks_geo} + 0,0206538 \text{ d_bts} \end{aligned}$$

Sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil estimasi model persamaan empiris di atas bahwa nilai konstanta model adalah sebesar 0,6872519, dapat diartikan jika nilai prediktor bebas alokasi anggaran bidang belanja Desa (belanja pemerintahan Desa, belanja pembangunan Desa, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga) dan tipologi Desa (Indeks Kesulitan Geografis, jumlah rumah tangga, dan *dummy* keberadaan menara telekomunikasi atau BTS) dianggap tidak ada perubahan (konstan), maka dapat menentukan capaian Indeks Desa Membangun masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 0,6872519 atau dapat dikategorikan kedalam capaian *indeks_desbang* sebagai Desa Berkembang.

Tabel 6.
Estimasi Partial Fit Model Dan Nilai T, Indeks_Desbang (Depvar)

<i>Indepvar</i>	<i>Estimator</i>	(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pemerintahan Desa (<i>b_pmrthdes</i>)	<i>Coef. t</i>	0,00258	0,00121	0,00045	0,00069
	$P > t $	(2,01)	(1,03)	(0,39)	(0,60)
		0,045**	0,301	0,700	0,546
Belanja Pembangunan Desa (<i>b_bangundes</i>)	<i>Coef. t</i>	-0,00083	-0,00035	-0,00158	-0,00166
	$P > t $	(-0,88)	(-0,40)	(-1,79)	(-1,90)
		0,379	0,687	0,074	0,058
Belanja Pemberdayaan Masyarakat (<i>b_dayamas</i>)	<i>Coef. t</i>	0,00801	0,00814	0,00825	0,00782
	$P > t $	(2,68)	(2,99)	(3,07)	(2,95)
		0,008**	0,003**	0,002**	0,003**
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan (<i>b_binakemas</i>)	<i>Coef. t</i>	0,00143	0,00542	0,00506	0,00419
	$P > t $	(0,66)	(2,72)	(2,57)	(2,14)
		0,510	0,007**	0,010*	0,033*
Belanja Tidak Terduga (<i>b_tdkterduga</i>)	<i>Coef. t</i>	0,01303	0,00723	0,00825	0,00808
	$P > t $	(0,31)	(0,19)	(0,22)	(0,22)
		0,758	0,851	0,828	0,829
Indeks Kesulitan Geografis (<i>indeks_geo</i>)	<i>Coef. t</i>		-0,00255	-0,00217	-0,00197
	$P > t $		(-13,59)	(-10,77)	(-9,65)
			0,000***	0,000***	0,000***
Jumlah Rumah Tangga	<i>Coef.</i>			0,00002	0,00002

(jmlh_rt)	<i>t</i>			(4,81)	(3,98)
	<i>P> t </i>			0,000***	0,000***
Keberadaan Menara Telekomunikasi (d_bts)	<i>Coef.</i>				0,02065
	<i>t</i>				(4,68)
	<i>P> t </i>				0,000***
Konstanta (_cons)	<i>Coef.</i>	0,61038	0,71879	0,70427	0,68725
	<i>t</i>	(67,06)	(62,56)	(60,00)	(56,54)
	<i>P> t </i>	0,000***	0,000***	0,000***	0,000***
	N (Sampel)	873	873	873	873
	R-Squared	0,0707	0,2340	0,2540	0,2725
	Adjusted R-Squared	0,0653	0,2287	0,2480	0,2658

Sumber: data olahan

Jika dilihat dari masing-masing nilai koefisien regresi (*coef.*) dari model empiris penelitian di atas, maka dapat diperoleh beberapa prediktor bebas yang memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap capaian Indeks Desa Membangun. Secara korelasional (*coef.*), nilai koefisien regresi dari prediktor bebas alokasi anggaran belanja Desa yang terdiri dari belanja pemerintahan Desa sebesar 0,0006957, belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 0,0078215, belanja pembinaan kemasyarakatan sebesar 0,0041891, dan belanja tidak terduga sebesar 0,0080808 memiliki pengaruh positif terhadap capaian Indeks Desa Membangun masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019. Namun, prediktor bebas alokasi anggaran belanja Desa untuk bidang belanja pembangunan Desa sebesar 0,0016582 memiliki pengaruh negatif terhadap capaian Indeks Desa Membangun masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019. Dengan kata lain, jika nilai prediktor bebas anggaran belanja Desa untuk bidang pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga semakin ditingkatkan alokasinya, maka capaian Indeks Desa Membangun juga semakin meningkat pula. Untuk masing-masing nilai koefisien regresi (*coef.*) dari prediktor bebas tipologi Desa (karakteristik wilayah) model empiris penelitian di atas, maka dapat diperoleh secara korelasional (*coef.*), nilai koefisien regresi dari jumlah rumah tangga sebesar 0,0000181 dan keberadaan menara telekomunikasi (*dummy_bts*) sebesar 0,0206538, memiliki pengaruh positif terhadap capaian Indeks Desa Membangun masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019. Namun, prediktor bebas tipologi Desa untuk indikator Indeks Kesulitan Geografis sebesar 0,0019675 memiliki pengaruh negatif terhadap capaian Indeks Desa Membangun masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019. Dengan kata lain, jika nilai prediktor bebas tipologi Desa (karakteristik wilayah) untuk jumlah rumah tangga dan keberadaan menara telekomunikasi semakin ditingkatkan kuantitasnya, maka capaian Indeks Desa Membangun juga semakin meningkat pula, ataupun sebaliknya untuk Indeks Kesulitan Geografis akan menurunkan nilai capaian Indeks Desa Membangun hal ini sejalan dengan penelitian (Adinugroho et al., 2016) yang menyimpulkan bahwa tingginya indeks kesulitan Geografis akan menghambat pembangunan.

Uji signifikansi parameter yang digunakan dalam model regresi linier berganda ini adalah dengan menggunakan *t_{test}*. Uji *t* digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dalam model regresi linier berganda Berdasarkan Tabel 6, Secara keseluruhan, hasil estimasi model secara parsial terhadap model ini memberikan kesimpulan bahwa dengan melakukan perhitungan menjadi 4 (empat) bagian melalui pendekatan *multiple linear regression*, maka diperoleh nilai kemampuan model dalam mengestimasi nilai capaian Indeks Desa Membangun pada setiap bagian (*Adjusted R-Squared*). Terlihat bahwa *Adjusted R-Square* model pada bagian pertama hanya sebesar 0,0653 (6,53%) namun pada bagian keempat menjadi 0,2658 (26,58%). Artinya, terjadi peningkatan kemampuan model dalam mengestimasi *indeks_desbang* sebagai variabel *outcome* dengan jangkauan beda *Adjusted R-Square* sebesar $\Delta Adj. R^2 = 0,2005$ (0,2658 – 0,0653) atau sebesar 20,05%. Dengan kata lain, perubahan kemampuan estimasi ($\Delta Adj. R^2$) model melalui prediktor bebas alokasi anggaran belanja Desa dan tipologi Desa (karakteristik wilayah) terhadap capaian Indeks Desa Membangun masing-masing kabupaten di Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebesar 20,05%.

Simpulan

Berdasarkan hasil empiris penelitian ini, maka terdapat beberapa relevansi yang dapat disimpulkan terkait hasil hipotesis penelitian, yaitu :

1. Belanja desa yang bersumber dari Alokasi Dana desa dan Dana desa Berpengaruh signifikan terhadap capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Riau tahun 2019.
2. Alokasi belanja Desa yang terdiri dari belanja pemerintahan Desa, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja pembinaan kemasyarakatan, belanja tidak terduga, dan tipologi wilayah yang terdiri dari jumlah rumah tangga dan keberadaan BTS di desa memiliki pengaruh positif Sedangkan belanja pembangunan desa tidak berdampak positif terhadap capaian Indeks Desa Membangun masing-masing desa di Provinsi Riau tahun 2019

3. Karakteristik wilayah berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis berpengaruh signifikan terhadap indeks Desa membangun dengan arah yang negatif.

Daftar Pustaka

- Adinugroho, G., Arifahilah, I., Elvina, S., Inriyatni, S., & Aisyah, T. (2016). Pola Spasial Indeks Kesulitan Geografis dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Kabupaten Gunungkidul. *Plano Madani*, 5 (2), 158-170
- Hanibal, Hamidi. (2015). *Indeks Desa Membangun* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta Selatan
- Kartohadikoesomo, Soetardjo, (1984), *Desa*. Jakarta, Balai Pustaka
- Kuncoro. Mudrajad (2019). *Ekonomika Desa*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Muhtarom, Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(02), 179–190. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>
- Oktaviana O, & Bachrudin (2017). Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi. *LAB-AP FISIP Untirta*
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld. 2009. *Ekonomi Mikro Edisi Keenam Jilid 1*. Penerbit Indeks. Jakarta
- Shatfer, R., S. Deller., and D. Marcouller., (2004) *Community Economics: Lingking Theory and Practice* Blackwell Publishing. Australia
- Sharma, S., S. Singh, et al. (2012). "Performance Appraisal and Career Development." *International Journal of Business and Management Research* 2(1): 8-16.
- Sunu, M. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 843-872 <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i08.p02>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>